



## Penerapan Etika Politik Rasulullah dalam Tinjauan Etika Politik Islam Masa Kini

Ernawati<sup>1</sup>, Syamsinar Bahar<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [10200122066@uinalauddin.ac.id](mailto:10200122066@uinalauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [10200122047@uinalauddin.ac.id](mailto:10200122047@uinalauddin.ac.id)<sup>2</sup>,

[Kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:Kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This article discusses the application of the Prophet's political ethics in reviewing contemporary Islamic political ethics. Islamic political ethics can be seen in several aspects, such as the appointment of leaders, ethics in dealing with rebels, the choice of forms and systems of government, attitudes as politicians, and other issues related to government. Islamic political ethics is always guided by Divine revelation in the form of the Koran and hadith, so that when a leader makes a political decision, he is immediately held accountable before God.*

*Political ethics in Islam includes two things: (1) as a moral philosophy that concerns the political aspects of human life (legitimacy of political power); (2) political ethics refers to behavior when carrying out political activities (political moral aspects), such as chivalry, elegance, politeness, and carrying out duties. The role of political ethics in society is to provide theoretical tools to question and explain political legitimacy in a responsible, rational, objective and argumentative manner. Political ethics is a question of political reality in early Islamic society and how it happened. This is a matter of how society views people who have great power. Islamic politics can also be interpreted as the political activities of some Muslims who use Islam as a standard of values and a basis for group solidarity. Political ethics contains two meanings, namely as a moral philosophy which concerns the political aspects of human life (legitimacy of political power) and political ethics which refers to behavior when carrying out political activities (moral aspects of politics), such as chivalry, elegance, politeness, and carrying out duties. The role of political ethics in society is limited to providing theoretical tools to question and explain political legitimacy in a responsible, rational, objective and argumentative manner; not based on emotions, prejudices and a priori. The task of political ethics is to objectify the discussion of ideological issues that are not directly related to actual politics.*

**Keywords:** *Political Ethics, Islam, Rasulullah, Politics*

**Abstrak.** Artikel ini membahas penerapan etika politik Rasulullah dalam tinjauan etika politik Islam masa kini. Etika politik Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti pengangkatan pemimpin, etika dalam menghadapi pemberontak, pilihan bentuk dan sistem pemerintahan, sikap sebagai politisi, dan masalah lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Etika politik Islam selalu berpedoman pada wahyu Ilahi berupa Al-Qur'an dan hadis, sehingga ketika seorang pemimpin mengambil suatu keputusan politik, ia langsung diminta pertanggungjawaban dihadapan Tuhan. Etika politik dalam Islam mencakup dua hal: (1) sebagai filsafat moral yang menyangkut aspek politik kehidupan manusia (legitimasi kekuasaan politik); (2) etika politik mengacu pada perilaku ketika melakukan aktivitas politik (aspek moral politik), seperti kesatriaian, keanggunan, kesopanan, dan pelaksanaan tugas. Peran etika politik dalam masyarakat adalah menyediakan alat teoretis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif.

Etika politik merupakan persoalan realitas politik dalam masyarakat Islam awal dan bagaimana hal itu terjadi. Ini adalah persoalan bagaimana masyarakat memandang orang yang punya kekuasaan besar. Upaya politik umat Muslim tertentu yang mendasarkan kekompakan kelompok dan standar moral mereka pada Islam. Etika politik mengandung dua pengertian, yaitu sebagai filsafat moral yang menyangkut aspek politik kehidupan manusia (legitimasi kekuasaan politik) dan etika politik yang mengacu pada perilaku ketika melakukan aktivitas politik (aspek moral politik), seperti kesatriaian, keanggunan, kesopanan, dan pelaksanaan tugas. Peran etika politik dalam masyarakat terbatas pada menyediakan alat teoretis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif, bukan berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori. Tugas etika politik adalah mengobjektifikasi pembahasan persoalan ideologis yang tidak berkaitan langsung dengan politik aktual.

**Kata Kunci:** Etika Politik, Islam, Rasulullah, Politik

## 1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai permasalahan etika dan politik tidak lepas dari permasalahan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, etika dan politik menjadi kebutuhan fungsional hidup. Etika adalah kode etik yang didasarkan pada sistem nilai masyarakat tertentu dan berfungsi untuk mengajarkan perilaku baik kepada masyarakat dan membimbing mereka menjauhi perilaku buruk. Etika mengatur dan mengarahkan citra masyarakat kepada moralitas yang tinggi dan mengarahkan tingkah laku manusia. Etika mengharuskan orang bersikap rasional terhadap semua norma. Oleh karena itu, etika pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan otonomi masyarakat. Etika diperlukan sebagai pengantar berpikir kritis yang dapat membedakan mana yang sah dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah. Etika memberi kita kesempatan untuk menetapkan posisi kita dan menentukan arah pembangunan sosial (Nizar, 2018)

Etika politik Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti: Pengangkatan pemimpin, etika dalam menghadapi pemberontak, pilihan bentuk dan sistem pemerintahan, sikap sebagai politisi, dan masalah lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal inilah yang membedakan etika politik Islam dengan etika politik biasa. Etika politik Islam selalu berpedoman pada wahyu Ilahi berupa Al-Qur'an dan hadis, sehingga ketika seorang pemimpin mengambil suatu keputusan politik, ia langsung dimintai pertanggungjawaban dihadapan Tuhan (Novianto & Prihatin, 2018).

Etika adalah suatu sistem prinsip moral atau aturan perilaku yang menentukan atau mempengaruhi perilaku orang, prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Di sisi lain, Magnis Suseno berpendapat bahwa etika politik bukanlah persoalan perilaku politik, melainkan persoalan realitas politik (al-salaf al-shari) dalam masyarakat Islam awal (al-salaf al-shari) dan bagaimana hal itu terjadi. Dijelaskannya, ini adalah persoalan bagaimana masyarakat memandang orang yang punya kekuasaan besar. Menurut Nachorish, Majid memiliki realitas menghormati domain-domain publik, meliputi kebebasan, hak asasi manusia, partisipasi, dan keadilan sosial. (Dahlan, 2021)

kini yang berdasarkan pada dapat dilihat sebagai manifestasi politik islam masaa standar moral para anggotanya dan kelompok yang mematuhi hukum Islam. Selain itu, politik dapat dilihat sebagai perwujudan politik Islam saat ini, yang didasarkan pada standar moral anggota dan kelompok yang mematuhi hukum Islam. Selain itu, politik dapat dilihat sebagai perwujudan politik Islam saat ini, yang didasarkan pada standar moral anggota dan kelompok yang mematuhi hukum Islam. Karena syariat dan iman Islam, Ad Dein Wad Daula tetap

berlaku .dari syariat Islam dan iman, Ad Dein Wad Daula tetap berlaku. tidak sama dengan agama lain seperti Buddha , Hindu, Yahudi , atau Kristen. Agama tidak mengajarkan politik, ekonomi, hukum, pemerintahan , atau masyarakat; sebaliknya, mereka hanya memberikan ajaran moral .tidak tidak membahas politik, ekonomi,politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, atau masyarakat; mereka hanya hukum, pemerintahan,pendidikan moral .atau masyarakat; mereka hanya memberikan pendidikan moral (Wajdi Ibrahim, 2012)

menurut ke FranzMagnis Suseno (1994), adalah studi tentang sifat manusia dan hak asasi manusia Magnisindividu , bukan hanya sebagai warga negara suatu negara .Suseno (1994), merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia danhak sebagai individu, bukan hanya sebagai warga negara Menurut Untuk ini, etika politik mempunyai dua makna. pertama, sebagai kode kode moral yang menjunjung tinggi politik hak asasi manusiahak asasi (legitimasi kekuasaan politik). Lebih jauh lagi, etika politik etikamempengaruhi pelaksanaan aktivitas politik ( politik moral), seperti advokasi , lobi, e -petisi, dan pelaksanaan tugas .mempengaruhi pelaksanaan kegiatan politik (politik moral ) , seperti advokasi , lobi , e-petisi, dan pelaksanaan tugas .

Peran etika politik dalam masyarakat terbatas pada menyediakan alat teoretis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, artinya, bersifat rasional, obyektif, dan argumentatif, bukan berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori. Tugas etika politik adalah mengobjektifikasi pembahasan persoalan ideologis yang tidak berkaitan langsung dengan politik aktual. Manusia, meskipun unik, tersusun atas dua komponen penting: komponen jasmani dan komponen rohani, yaitu jiwa dan badan rohani. Setiap orang adalah individu, yang berasal dari kata bahasa Inggris “In” dan “divide”, dan individu berarti perpaduan utuh dari dua unsur penting tersebut di atas. Ketika kedua elemen ini hadir, ia bukan lagi seorang individu. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial(*Etika Politik.pdf*, n.d.)

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan suatu pengkajian pustaka yang mengadopsi paradigma empiris yang cermat. Studi kepustakaan dijalankan sebagai instrumen analisis yang mendalam, mengkaji literatur dan laporan yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Fokus utama dari penelitian ini, yaitu pada doktrin etika politik yang ditujukan pada lembaga negara di Indonesia sesuai dengan pandangan Nurcholish Majid. Dengan menekankan bagaimana konsep etika politik yang dipaparkan oleh Nurcholish Majid, yang pada intinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahan kepada seluruh

lembaga negara (pejabat negara) mengenai bagaimana pentingnya penanaman etika politik serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih lanjut tentang bagaimana pandangan Nurcholish Majid dapat berpengaruh terhadap lembaga negara di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengertian Etika Politik Serta Relasinya Dengan Agama**

Istilah “etika” berasal dari kata Yunani “ethos,” yang mengacu pada kecenderungan ke arah tinggal tunggal, padang rumput, tradisionalistadat, watak, perasaan, sikap, atau pikir. Istilah "*Taetha*" mengacu pada bias. pengetahuan tentang bias yang menurunkan potensi manusia. realitas demokratis dan partisipatif yang memandu dan melindungi ruang publik seperti hak asasi manusia, kebebasan, partisipasi, dan kemajuan sosial dikenal sebagai hakikat. akal sehat secara hakiki berhubungan dengan hakikat manusia, moralitas,

Pertama, politik adalah hal yang wajar bagi manusia, dan beberapa kelompok manusia dibanggakan dan dihormati karena keunggulannya, apakah mereka unggul dalam kekuatan atau keberanian, atau unggul dalam kecerdasan atau kebijaksanaan. Islam tidak bisa dipisahkan Politik dan umat Islam “hancur oleh sejarah” bahkan “berlumuran darah”.

Islam merupakan agama keyakinan yang taat dan taat beribadah, namun ia juga mengakui adanya perbedaan keyakinan, bahkan terkadang itu adalah penganut agama yang berbeda. taat beragama dan taat beribadah, namun juga mengakui adanya perbedaan keyakinan. Istilah ketentuan "سلم" "Salam إسلام" sendiri terdiri dari tiga unsur: keamanan, kedamaian, dan ketaqwaan. "أسلم إسلام" sendiri terdiri dari tiga unsur: keamanan, kedamaian, dan ketaqwaan. Misi Islam adalah untuk menebus umat manusia kemanusiaan tragedi masa lalu, termasuk peperangan, pertikaian, dan ketaatan pada masa Jahiliyah. dari tragedi masa lalu, termasuk peperangan, pergaulan, dan ketaatan pada agama di masa Jahiliyah. Mula-mula terdapat adalah dua gagasan ekstrinsik, kemudian terdapat gagasan sentris, gagasan sayap kanan, dan dua inisayap kiri. gagasan ekstrinsik, kemudian ada gagasan sentris, sayap kanandan sayap kiri gagasan. Mengurangi tetapi tiga antara aspirasi tentang kebutuhan agama dan politik, dan terus membentuk pemikiran dunia politik Islam pada tataran praktis juga. (Shobron, 2013)

Etika politik dinilai sangat penting untuk menjaga situasi politik baik individu maupun kelompok institusi politik. Nilai-nilai etika politik yang terkandung dalam Al-Qur'an antara lain ajaran tentang kejujuran, amanah, menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, musyawarah, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan antar manusia. Semua aktor politik harus memiliki nilai-nilai tersebut (Yuniartika, 2022)

Ketiga pola pikir tersebut adalah: Pertama, orang-orang yang membedakan politik dan agama berada dalam bidang yang berbeda: agama adalah isu Ukraina, dan politik adalah isu ideologis yang didasarkan pada ajaran Islam dunia. Pola inilah yang disebut sekularisme dalam Gus Dur, Indonesia (nomor: Thaha Husein dan Ali Abd. Raziq).

Kedua, ada yang berpendapat bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan dan diintegrasikan karena agama tidak hanya berkaitan dengan ekonomi tetapi juga menentukan kehidupan di dunia. Umat Muslim percaya pada kesempurnaan Islam karena Islam mengatur setiap aspek kehidupan dan berlaku dalam keluarga, bisnis, dan politik, yang dikenal dengan tiga D (Don, Duniya, dan Daula).

Oleh karena itu, pengetahuan tentang negara Islam, negara yang utuh, harus diciptakan. Golongan ini antara lain Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan tokoh-tokoh Indonesia yang tergabung dalam gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Termasuk Nasir, Hasyim Asiari dan tokoh-tokoh selanjutnya. Ketiga, Islam hanya mengatur prinsip-prinsip dan mengajarkan etika normatif, dan jelas Islam mengajarkan etika tidak hanya dalam politik tetapi juga dalam kehidupan secara lebih luas.

Oleh karena itu, meski umat Islam paham bahwa politik tidak bisa lepas dari kekuasaan, namun mereka tidak boleh tergoda untuk berpuas diri pada kekuasaan saja atau meninggalkan etika. "Politik adalah kekuasaan, politik adalah kekuasaan, atau semua politik adalah tentang kekuasaan," kata Andrew Heywood ketika berbicara tentang "Kekuasaan, Otoritas, dan Legitimasi."<sup>11</sup> Harold Lasswell mengatakan "Politik: Dia juga berbicara tentang sifat kekuasaan." Buku "Kapan dan Bagaimana" (1936): Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Dengan kata lain, politik adalah tentang siapa yang memegang kekuasaan.

Kedua, Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadits, meliputi aspek keimanan, ibadah, akhlak (etika Islam), Mu'amarra, dan Duniyawiyah. Siapapun yang menekuni bidang Muamara, misalnya politik, harus mempunyai etika yang baik, karena konstruksi Muamara tergantung pada tingkat moralitas individu.(Sugiyono, 2022)

Bagi Khaldun, manusia sebagai masyarakat membutuhkan alwazi (pemimpin) untuk menjalankan kekuasaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mencegah tindakan kekerasan antar masyarakat. Pemimpin diikuti karena mereka mempunyai kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. Hubungan sosial masyarakat didasarkan pada hubungan turun-temurun, apa yang disebutnya dengan ashabiyat, atau kesatuan kelompok sebagai kekuatan kelompok. Dengan cara ini, daura (pemerintahan) tercipta ketika suatu kelompok berhasil

mengalahkan kelompok lain dan memperoleh kekuatan politik melalui kemenangan tersebut.(Usman, 2017)

UUD 1945 mengatur soal agama dan kepercayaan pada Pasal 29 ayat (1) dan (2). Negara menjamin kebebasan dan kemandirian warga negaranya untuk menganut agama atau kepercayaannya sepanjang tidak melanggar hukum atau mengganggu agama atau Kepercayaan warga negara lain. Ada standar yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dasar moralitas politik Pancasila terhadap umat Islam (internal) Indonesia dalam hal sikap dan perilaku.(Abdul Hafid et al., 2020). Menurut Nurcholish Majid, realitas politik masyarakat Islam awal (al-Salaf al-Sharī) adalah masyarakat Hal ini demokratis dan partisipatif, dan menghormati kebebasan seperti hak asasi manusia, partisipasi, dan ruang publik, termasuk keadilan sosial.(Ahsan, 2015)

### **Penerapan Etika Politik Islam Pada Masa Rasullulah**

Tinjauan etika politik Islam. Ada pula konsep sukkah (Mu'ākhāh) yang memegang peranan penting. Muakah merupakan konsep solidaritas sosial dan gotong royong antar umat beriman. Konsep ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang adil dan harmonis dalam masyarakat, termasuk dalam konteks politik.(Yusri, 2020)

Etika politik Islam berdasarkan konsep persatuan menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan saling menghormati antar sesama umat Islam, serta memperluas nilai-nilai tersebut kepada masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini berperan dalam membentuk tata kelola politik yang mengedepankan keadilan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kerangka nilai-nilai agama Islam. Mengutamakan kewajaran, keadilan dan kemanusiaan dalam kerangka nilai-nilai agama Islam. Islam pada umumnya memiliki prinsip-prinsip politik dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an.

Pertama, mengenai pemeliharaan hubungan antara kepala negara dan rakyat, mencakup tugas kepala negara, antara lain , memberikan nasihat kepada rakyat, menegakkan keadilan, memelihara perdamaian, dan bahwa suku minoritas mempunyai hak yang sama hak berdasarkan hukum. Kedua, tugas nasional mencakup, antara lain, kepatuhan bersyarat. Untuk mempertimbangkan dan melestarikan kualitas moral dan semangat masyarakat. Ketiga: Hubungan diplomatik, termasuk hubungan antara negara-negara Islam dan non-Islam, cinta damai tanpa memaksakan masuknya agama, menaati perjanjian yang telah disepakati, mendorong kesabaran dan ketekunan, memelihara persaudaraan (*18517-62916-1-PB (1) (2)*, n.d.)

Di masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW memegang peranan yang sangat penting sebagai pemimpin masyarakat Madinah. Nabi mempunyai banyak kapasitas sebagai

nabi, rasul, kepala negara, dan hakim. Nabi memiliki dua kualitas kepemimpinan. Inilah ciri-ciri pemimpin spiritual/agama dan ciri-ciri pemimpin politik. Al-Qur'an mempunyai banyak ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai terkait siyasa yang harus diamalkan oleh para khorifah terdapat dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis. Termasuk di dalamnya Surah An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan dan ketaatan.

Ayat ini menyebutkan Allah SWT. Saya sebagai Khalifah menyatakan kepada kita semua bahwa setiap perbuatan masyarakat bumi ini harus berpedoman pada nilai-nilai ketaatan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ada aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib ditaati, tetapi jika aturan atau pedoman tersebut tidak sesuai dengan aturan Allah, maka berlaku sebaliknya. Padahal, dalam ayat ini Allah berfirman bahwa jika umat Islam benar-benar mengaku beriman, maka jika terjadi perselisihan mengenai suatu persoalan, maka penyelesaiannya harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya serta menenteramkan umat Islam. (Almalachim & Maulana, 2021)

Persatuan umat Islam merupakan kesimpulan logis dari konsep persaudaraan yang dilandasi iman (Ukhwa Islamiyah). SAW Rasulullah berdasarkan hal ini. Mengintegrasikan Ensor (masyarakat asli Madinah) dan pendatang (Muhajirin) melalui konsep ukhwa berbasis agama. Perkembangan selanjutnya, fenomena sosial politik Madinah pada masa hidup Nabi Muhammad SAW ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah, Sahifat, dan Mitsak al-Madina. Disahkannya Piagam Madinah merupakan tonggak pertama pengakuan dunia Islam terhadap konstitusi yang dianggap paling modern saat itu. Munawir Shazali mengatakan, "Patut dicatat bahwa Piagam Madinah dikatakan sebagai konstitusi atau hukum negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi SAW." (Yusuf et al., 2017)

Dalam perkembangan selanjutnya, fenomena sosial politik Madinah pada masa hidup Nabi Muhammad SAW ditandai dengan Piagam Madinah, Shahifat, dan lahirnya Mitsak al-Madinah. Lahirnya Piagam Madinah merupakan tonggak pertama pengakuan dunia Islam terhadap konstitusi yang dianggap paling modern pada masanya. Munawir Shazali mengatakan, "Perlu disebutkan bahwa Piagam Madinah dikatakan sebagai konstitusi atau hukum negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi SAW." (Handoyo, 2016)

Mencapai kesepakatan secara damai diyakini diperlukan untuk menyatukan masyarakat yang beragam baik dari latar belakang sosial budaya maupun agama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, disepakati dan ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan pemimpin tertinggi negara. Perjanjian tersebut menyatakan: "Konstitusi nasional membawa perubahan dan perbaikan yang sangat penting dan, setidaknya bagi Arab,

sangat revolusioner dengan menyediakan lembaga publik pusat bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan di satu tempat yang dapat diperjuangkan oleh semua orang” sebagian besar kekuasaan keluarganya, itulah nama Piagam Madinah pada saat itu. ” Adanya Piagam ini yang terdiri dari 47 pasal dan terbagi dalam 10 bab, berarti Nabi secara langsung dan tidak langsung memberikan pendidikan politik kepada umat, baik Muslim maupun non-Muslim. Muhammad Hamidullah menilai dampak yang ditimbulkan oleh adanya Piagam Madinah sebagai berikut: Artinya, Piagam Madinah merupakan negara yang mampu membawa perubahan penting bahkan sangat revolusioner, setidaknya bagi negara Arab dimaksudkan untuk menjadi konstitusi. Dengan memberikan sistem untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan mendapatkan apa yang menjadi hak diri sendiri dan keluarga. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa setelah piagam atau perjanjian ini ditandatangani oleh berbagai kelompok yang hadir di Madinah pada saat itu, lahirlah gerakan demokrasi di Madinah di tengah masyarakat majemuk dengan aliran politik dan ideologi yang berbeda-beda(Yusri, 2020)

Persatuan umat Islam merupakan kesimpulan logis dari konsep persaudaraan yang dilandasi iman/keyakinan (Ukhwa Islam). SAW Rasulullah berdasarkan hal ini. Mengintegrasikan Ensor (masyarakat asli Madinah) dan pendatang (Muhajirin) melalui konsep ukhwa berbasis agama. Persaudaraan berbasis agama ini menyatukan berbagai golongan Yatsrib menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mengalahkan persaudaraan berbasis darah. Kedepannya, Bangsa dan etika kebangsaan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia.

Sebab tanpa adanya etika tersebut maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan tenteram, tenteram, dan harmonis. Oleh karena itu, sangat penting bagi warga negara Indonesia dan umat Islam untuk memahami dan menyadari pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab sejatinya ajaran Islam Nabi Muhammad SAW mempunyai misi profetik untuk menyempurnakan akhlak mulia. Oleh karena itu, dengan memahami dan mewujudkan etika kebangsaan, maka kita sebagai bangsa sebenarnya sedang mewujudkan ajaran Islam itu sendiri. (Zaenab, 2022). Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat sipil. Untuk membangun masyarakat yang ideal, kedua belah pihak harus bekerja sama dan berfungsi secara sinergis.

Namun, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak saling mempercayai. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah hal terpenting untuk membangun masyarakat sipil yang damai dan demokratis, kata Pak Jamaluddin Ankok. (Amin, Ilmu, dan Vol 2022). Selain itu, politik Islam dapat didefinisikan



sebagai tindakan politik yang dilakukan oleh sebagian orang Islam yang menggunakan Islam sebagai standar nilai dan landasan solidaritas kelompok. Ad Deīn Wad Daula karena Islam mencakup iman dan syariah. Hal ini pasti sangat berbeda dengan keyakinan agama lain, seperti Kristen, Yudaisme, Budha, dan Hindu. Tidak ada pelajaran tentang sistem politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, atau sosial yang terkandung dalam agama-agama tersebut. (Dan & Dan, 2020)

Dalam kesatuan ini, tidak ada lagi perbedaan berdasarkan agama, suku, golongan, atau kepentingan apa pun. Oleh karena itu, ide tentang masyarakat sipil adalah yang paling sesuai untuk konteks Indonesia karena itu berasal dari gagasan politik Islam yang digunakan pada masa awal pemerintahan Islam di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Menurut Nurcholish Majid, masyarakat Islam awal (al-Salaf al-Sharī) adalah masyarakat demokratis dan partisipatif yang menghargai dan menghormati ruang publik, seperti kebebasan sipil. (Fajrussalam et al., 2022)

### **Penerapan Etika Politik Masa Kini**

Nilai-nilai politik Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan mempengaruhi hukum politik Indonesia dan budaya politik yang dipraktikkan, namun juga dipengaruhi oleh tradisi politik daerah, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan multikulturalisme. Konstitusi dan Undang-undang: Kerangka dan aturan pelaksanaan politik diatur oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Struktur konstitusi, undang-undang, dan peraturan mempengaruhi distribusi kekuasaan, berfungsinya lembaga-lembaga politik, dan proses pengambilan keputusan. Partai Politik: Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia. Proses pemilu, pemilu, keberagaman partai, dan persaingan politik di Indonesia juga dapat mempengaruhi dinamika politik dan implementasi kebijakan (qobidl, *Journal manager, 4\_Rofida (2).pdf*, n.d.). Seperti halnya etika, politik juga diartikan sebagai istilah yang berkaitan dengan pemerintahan. Makna politik di sini mencakup nilai-nilai estetis dan buruk, yang memerlukan banyak faktor, seperti berjalannya pemerintahan dan pengaturan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Pengambil kebijakan harus mampu mengukur perilaku manusia yang baik dan buruk serta mengarahkan perilaku tersebut ke arah yang lebih baik. Secara filosofis, politik mempunyai peran dan fungsi ganda. Meskipun politik bermanfaat bagi kemanusiaan, kepentingan bersama masyarakat juga harus dipertimbangkan. Politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga soal mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Jika dicermati, politik dan etika tidak mungkin dipisahkan. Kedua belah pihak sangat bergantung satu sama lain. Satu terapung, yang lain tenggelam. Para pemerhati politik Islam menganggap politik terkait dengan

etika. Dengan cara yang berbeda, filsuf moral Yunani membicarakan hubungan ini dalam domain filsafat moral, sedangkan teologis Islam membicarakannya dalam domain teologi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah agama dan politik tidak dapat dipisahkan bagi orang Islam. Ali Shariati adalah seorang intelektual Iran yang terkenal dengan perspektif yang luas. Ia tidak menganggap agama sebagai disiplin ilmu atau budaya, namun sebagai ideologi atau aliran pemikiran sebagai sistem kepercayaan.

Dalam konteks politik, terdapat juga konsep persatuan, yang menyatakan bahwa para pemimpin politik mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk menghormati hak-hak individu, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin distribusi sumber daya dan kekayaan negara yang adil (Lavan, 2021). Demokrasi sebagai sarana memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih kepala negara sebagai pejabat. Mengimplementasikan kebijakan tidaklah sesederhana teori demokrasi yang hanya sekedar kata-kata. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengutarakan keinginannya, memilih pemimpinnya, dan mengetahui arah pemerintahannya.

Masyarakat sebagai subjek demokrasi dan aktor demokrasi—pemimpin negara dan elit politik—mengakui keuntungan dari penerapan sistem demokrasi. Untuk merebut hati dan pikiran masyarakat, calon wakil rakyat dapat menggunakan kebebasan memilih pemimpin sebagai daya tarik politik. Masyarakat dapat menilai pemimpin yang dapat diandalkan melalui pertarungan visi dan misi. Ini juga memungkinkan masyarakat untuk mewujudkan aspirasi mereka. Bukan visi atau misi yang menentukan apakah seorang pemimpin bisa tetap berkuasa atau tidak, namun moralitas seorang pemimpin juga diperlukan untuk memimpin suatu negara.

Moralitas yang baik dapat menjadi kriteria dalam memilih calon pemimpin agar dapat mewujudkan demokrasi dan mencapai kesejahteraan sosial sesuai teori yang ada. Bukan tidak mungkin sistem demokrasi berkembang lebih cepat di beberapa negara karena masyarakat diberikan kebebasan penuh dan merekalah yang menentukan kebijakan pemerintahannya. (Lavan, 2021). Terlepas dari apakah mereka mempunyai kekuasaan atau tidak, moralitas seorang pemimpin juga diperlukan untuk menjalankan suatu negara. Moralitas yang baik dapat menjadi kriteria dalam memilih calon pemimpin agar dapat mewujudkan demokrasi dan mencapai kesejahteraan sosial sesuai teori yang ada. Bukan tidak mungkin sistem demokrasi berkembang lebih cepat di beberapa negara karena masyarakat diberikan kebebasan penuh dan merekalah yang menentukan kebijakan pemerintahannya. (Fajrussalam et al., 2022)

#### **4. KESIMPULAN**

Jurnal ini meneliti penerapan etika politik Nabi Muhammad dalam konteks etika politik Islam masa kini. Jurnal ini mendefinisikan etika politik Islam sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku politik, yang didasarkan pada wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan hadis). Etika politik Islam mencakup dua hal yaitu filsafat etika yang mengatur aspek politik kehidupan manusia (legitimasi kekuasaan politik) dan perilaku dalam aktivitas politik (aspek etika politik), seperti kesatriaan, tema, dan kesopanan. Jurnal ini menekankan bahwa etika politik Islam menyediakan alat teoritis untuk mendiskusikan dan menjelaskan legitimasi politik secara argumentatif, bertanggung jawab, rasional, dan objektif. Selain itu, jurnal ini membahas keadaan politik di awal masyarakat Islam, serta perspektif masyarakat terhadap mereka yang memiliki kekuatan besar. Jurnal tersebut mencapai kesimpulan bahwa politik Islam dapat didefinisikan sebagai tindakan politik yang dilakukan oleh sebagian orang Islam yang menjadikan Islam sebagai standar nilai dan dasar solidaritas kelompok.

Jurnal ini juga membahas pentingnya etika politik dalam menjaga situasi politik, baik individu maupun kelompok lembaga politik. Jurnal ini menekankan bahwa nilai-nilai etika politik yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti kejujuran, amanah, keadilan, kesejahteraan, musyawarah, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan antar manusia, harus dimiliki oleh semua aktor politik. Jurnal ini juga meneliti penerapan etika politik Islam pada masa Rasulullah, dengan mencontohkan konsep *sukkah* (Mu'ākhāh) yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang adil dan harmonis dalam masyarakat. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang etika politik Islam, dengan fokus pada penerapannya dalam konteks masa kini. Jurnal ini juga memberikan contoh-contoh konkret penerapan etika politik Islam dalam sejarah Islam, khususnya pada masa Rasulullah.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hafid, Pikhulan, R., & Hasyim, H. (2020). Etika hukum dalam politik kebangsaan perspektif Islam: Moralitas politik Pancasila. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 70–89.
- Ahsan, N. (2015). Kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat Madani (Analisi Piagam Madinah dan relevansinya bagi Indonesia). *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 161–180.
- Almalachim, A. C., & Maulana, A. (2021). Konsep al-ukhuwah dalam al-Qur`ān (Kajian Tafsir Tematik). *Al'adalah*, 22(2), 167–194.

- Dahlan, D. (2021). Etika politik dalam Islam (Konstruksi dan perspektif). *Menara Ilmu*, 15(1), 42–50.
- Dan, S., & Dan, S. (2020). Pengenalan tadbir urus yang baik merupakan tajuk perbincangan yang amat popular. Kebanyakan perbincangan tentang tadbir urus yang baik hanya terhenti pada nilai, dan sejauh prinsip etika menurut perspektif semasa tanpa berlandaskan kepada doktrin negara, *d.*, 23\*(3), 218–231.
- Fajrussalam, H., Azhar, M. N., Hasanah, N. W., Aulia, S. N., & Farhan, Z. A. (2022). Pelaksanaan politik di Indonesia berdasarkan ajaran dan nilai dasar politik Islam. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 91.
- Handoyo, E. dkk. (2016). Etika politik. In *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 03(December 2016).
- Lavan, Y. O. (2021). Implementation of Islamic values in Indonesian political dynamics. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 53–66.
- Nizar, N. (2018). Hubungan etika dan agama dalam kehidupan sosial. *Jurnal Arajang*, 1(1), 27–35.
- Novianto, & Prihatin, A. (2018). Pemikiran Mohammad Natsir tentang etika politik Islam tahun 1930-1960. *Jurnal Prodi Sejarah*, 3(1), 94–106.
- Shobron, S. (2013). Konsep etika berpolitik dalam Kitab Sunan Abu Dawud. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11(1), 151–180.
- Sugiyono. (2022). Kontekstualisasi etika politik Islam. *Al Aqidah: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 41–47.
- Usman, U. (2017). Kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam (Refleksi atas pemikiran politik Islam). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 345–357.
- Wajdi Ibrahim, F. (2012). Pembentukan masyarakat madani di Indonesia melalui civic education. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(1), 130–149.
- Yuniartika, M. D. (2022). No Title הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים. 8.5.2017, 7ארג, 2003–2005.
- Yusri, A. Z., & D. (2020). Etika politik dan pemerintahan Islam dalam. In *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2).
- Yusuf, M., Ulum, B., Rusydi, M., & Ishak, M. (2017). Etika Islam dalam ranah politik: Respon dan tinjauan kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung, 2005-2015. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 41(1), 139–154.
- Zaenab, C. (2022). Membumikan moral berpolitik Nabi Muhammad di era 4.0. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), 157–166.